

Executive Summary

Keragaman Wilayah, Potensi Penggunaan Lahan Berkelanjutan, dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi untuk Rancangan Awal RPJPD Provinsi Sumatera Selatan

Desember 2023

Pesan Kunci

- Pertumbuhan ekonomi dan penduduk memberikan pengaruh pada peningkatan kebutuhan akan lahan. Di sisi lain, strategi ekspansi lahan tidak dapat lagi menjadi pilihan utama mengingat kendala ketersediaan dan dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan, termasuk risiko kebakaran hutan dan lahan.
- Sumatera Selatan merupakan provinsi yang perekonomiannya didominasi oleh sektor berbasis lahan, terutama pengembangan komoditas strategis. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah di sektor berbasis lahan menjadi kunci pengembangan ekonomi di masa depan.
- Luas lahan yang semakin terbatas juga mendorong pentingnya strategi peningkatan produktivitas dan diversifikasi pengelolaan lahan, salah satunya melalui skema agroforestri.
- Perencanaan pembangunan perlu memperhatikan kebutuhan dan ketersediaan akan lahan melalui integrasi dengan perencanaan tata ruang. Sinergi tata ruang dan gambut dalam konteks Sumatera Selatan menjadi bagian yang penting dalam arahan pembangunan agar meskipun ekonomi terus tumbuh, ekosistem yang memegang peranan penting dalam penyimpanan karbon ini dapat terus terjaga.
- Untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi hijau, Sumatera Selatan perlu memperhatikan indikator: Indeks Ekonomi Hijau, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKTL dan IKEG), Kerawanan Kebakaran Lahan, dan Emisi berbasis Lahan dan Gambut.

Kinerja Pembangunan Sumatera Selatan dan Tata Guna Lahan

Lahan menempati posisi penting dalam pembangunan wilayah di Provinsi Sumatera Selatan dimana peran lahan tidak hanya menjadi sumber daya tetapi juga sebagai penyedia jasa ekosistem. Pertumbuhan ekonomi dan penduduk memberikan pengaruh pada peningkatan kebutuhan akan lahan. Luas lahan produktif yang semakin berkurang juga dipengaruhi oleh batasan dan pengaturan yang dipengaruhi oleh faktor biofisik, sosial-ekonomi, dan kebijakan. Heterogenitas spasial antar wilayah pembangunan, seperti perbedaan antara kabupaten dan kota, menjadi faktor kunci yang menentukan tata guna lahan yang ideal.

Dalam konteks ini, perencanaan penggunaan lahan bukan hanya sekadar strategi, tetapi juga sebagai alat penapis dan pendukung berbagai target pembangunan. Dengan mempertimbangkan keberagaman, perencanaan yang matang dapat mengoptimalkan pemanfaatan lahan secara efisien, memungkinkan berbagai pemangku kepentingan untuk bersinergi demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

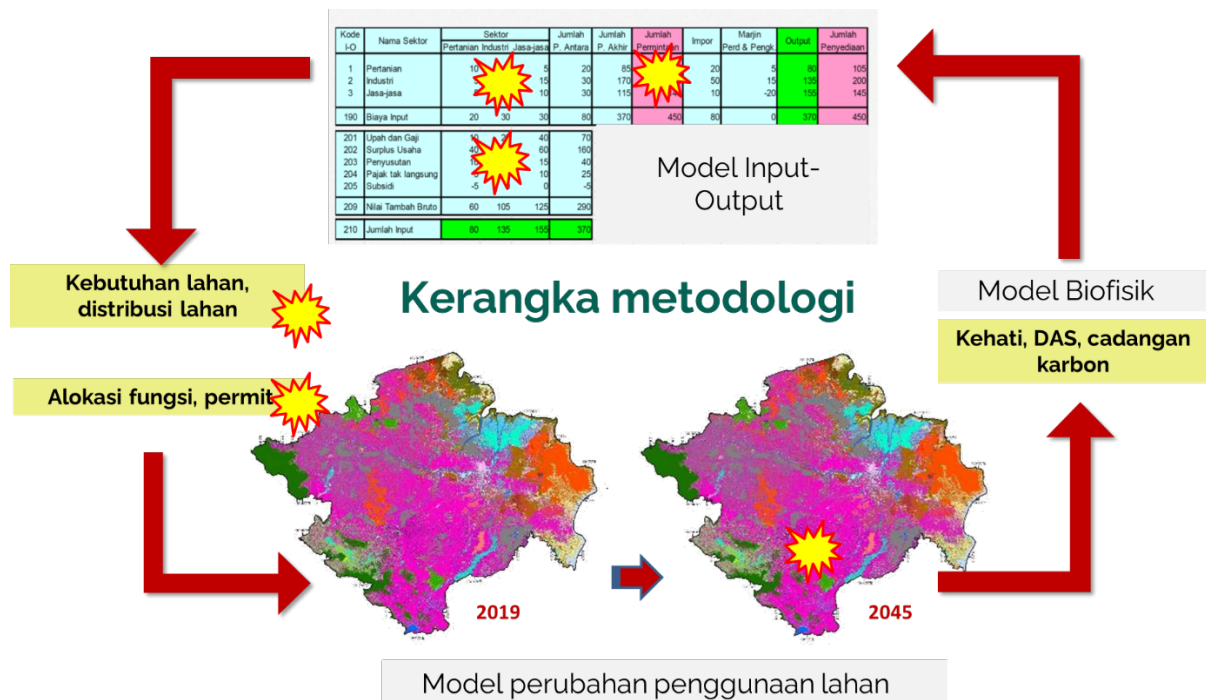
Beberapa rekomendasi KLHS RPJPD Sumatera Selatan relevan untuk ditinjau dan diacu. Isu tingginya alih fungsi lahan dan gambut menjadi salah satu permasalahan akibat ekspansi pembangunan yang berdampak pada degradasi lingkungan hidup di Sumatera Selatan, seperti meningkatnya kerentanan kebakaran hutan dan lahan. Berkaitan dengan isu tersebut, ekspansi aktivitas ekonomi dan masyarakat perlu dikendalikan melalui pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukan tata ruangnya dan daya dukung dan daya

tampung lingkungan hidup setempat. Seiring dengan pemanfaatan lahan yang sesuai, direkomendasikan arah kebijakan untuk mendorong pertanian cerdas iklim dan meningkatkan luas wilayah rehabilitasi.

Selaras dengan rekomendasi arah kebijakan dalam KLHS RPJPD, strategi ekspansi lahan tidak lagi menjadi pilihan utama mengingat kendala ketersediaan dan dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan, termasuk risiko kebakaran hutan dan lahan. Mendorong peningkatan produktivitas dan nilai tambah di sektor berbasis lahan menjadi kunci pengembangan ekonomi di masa depan. Untuk mengatasi dampak negatif, diperlukan langkah-langkah konkret yang mengacu pada indikator Ekonomi Hijau, seperti peningkatan kualitas lingkungan dan pengendalian emisi. Dengan demikian, Sumatera Selatan dapat merumuskan strategi pembangunan yang berkelanjutan dan memperkuat ekonomi tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan.

Metodologi

Pemodelan pertumbuhan ekonomi hijau dibangun dari pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai proses pembangunan yang kontekstual pada kewilayahan dan mencakup dinamika keruangan maupun waktu. Simulasi dari skenario pembangunan menggunakan perangkat lunak LUMENS (*Land-Use Planning for Multiple Environmental Services*) yang dirancang untuk menghasilkan proyeksi (*ex-ante*) kinerja yang diukur berdasarkan indikator makro yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Gambar 1).



Gambar 1. Kerangka metodologi analisis pertumbuhan ekonomi hijau

Sistem pertumbuhan ekonomi hijau dimodelkan sebagai sistem ekonomi regional menggunakan model Input-Output, dimana sektor lahan melakukan transaksi dengan sektor lain. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dari sektor lahan diterjemahkan ke dalam kuantifikasi luasan kebutuhan lahan untuk komoditas unggulan tertentu. Lokasi yang memungkinkan untuk terjadinya perluasan, intensifikasi maupun alih guna lahan berdasarkan infrastruktur, tutupan dan ketersediaan lahan dimodelkan secara *spatially explicit* untuk menghasilkan proyeksi peta tutupan/penggunaan lahan yang kemudian digunakan untuk mengkuantifikasi perubahan fungsi dan jasa ekosistem yang diakibatkan perubahan lahan. Dampak ini akan selanjutnya menjadi umpan balik kepada ekonomi regional.

Analisis dan pemodelan beberapa skenario pembangunan (skenario Bisnis Seperti Biasa atau *Business as Usual*/BAU) dan pertumbuhan ekonomi hijau menghasilkan peta intervensi, proyeksi peta tutupan/penggunaan lahan, proyeksi besaran dari indikator makro berdasarkan skenario pembangunan.

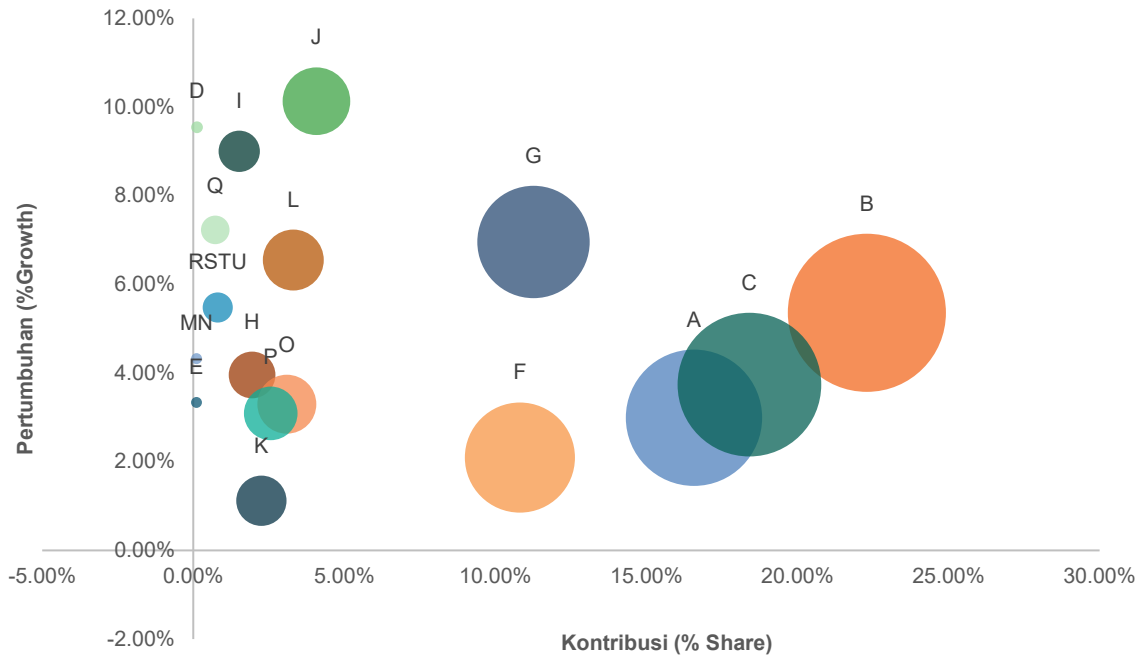
Hasil di atas digunakan dalam pembuatan rencana induk dan peta jalan pertumbuhan ekonomi hijau, yaitu dengan proses: (i) peta intervensi akan memberikan arahan program dan kegiatan sebagai bagian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek daerah, mendukung peninjauan kembali RTRWP, menyinergikan RPJMD kabupaten dan RTRWK dengan provinsi; (ii) peta proyeksi berguna untuk mengarahkan RTRWP dan RTRWK, mengantisipasi bencana dari dampak negatif alih guna lahan maupun praktik pengelolaan lahan tidak berkelanjutan, yang diperoleh dari analisa kuantitatif fungsi dan jasa lingkungan yang terdampak oleh alih guna lahan dan praktik lahan; (iii) analisa *trade-off* membandingkan berbagai skenario pembangunan dan berbagai dimensi keberlanjutan (ekonomi, sosial dan lingkungan).

Selayang Pandang Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Lahan Sumatera Selatan

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan muncul sebagai pilar utama dalam perekonomian Sumatera Selatan, dengan pertumbuhan dan kontribusi yang signifikan. Kabupaten seperti OKI, Musi Rawas Utara, dan Musi Rawas menjadi pionir dalam sektor ini menurut tipologi Klassen. Komoditas karet dan kopi merupakan komoditas basis, sementara kelapa sawit berada dalam kategori basis-berisiko.

Tabel 1. Kontribusi PDRB Sumatera Selatan 2017-2022 (dalam Juta Rupiah)

KBLI	SEKTOR	PDRB 17	PDRB 22	%SHARE 22	%AVG-G 1722
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	49,518,880	56,927,710	16.57%	2.99%
B	Pertambangan dan Penggalian	60,398,350	76,584,570	22.30%	5.36%
C	Industri Pengolahan	53,270,830	63,231,360	18.41%	3.74%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	286,980	423,940	0.12%	9.54%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	313,340	365,630	0.11%	3.34%
F	Konstruksi	33,616,270	37,136,080	10.81%	2.09%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28,699,600	38,682,810	11.26%	6.96%
H	Transportasi dan Pergudangan	5,581,780	6,686,240	1.95%	3.96%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,603,380	5,225,370	1.52%	9.00%
J	Informasi dan Komunikasi	9,294,880	14,003,880	4.08%	10.13%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,333,380	7,744,090	2.25%	1.12%
L	Real Estate	8,567,360	11,373,070	3.31%	6.55%
MN	Jasa Perusahaan	304,820	370,750	0.11%	4.33%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,133,730	10,639,940	3.10%	3.30%
P	Jasa Pendidikan	7,628,060	8,806,970	2.56%	3.09%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,835,970	2,499,670	0.73%	7.23%
RSTU	Jasa lainnya	2,183,400	2,781,580	0.81%	5.48%
	TOTAL	281,571,010	343,483,660	100.00%	4.40%



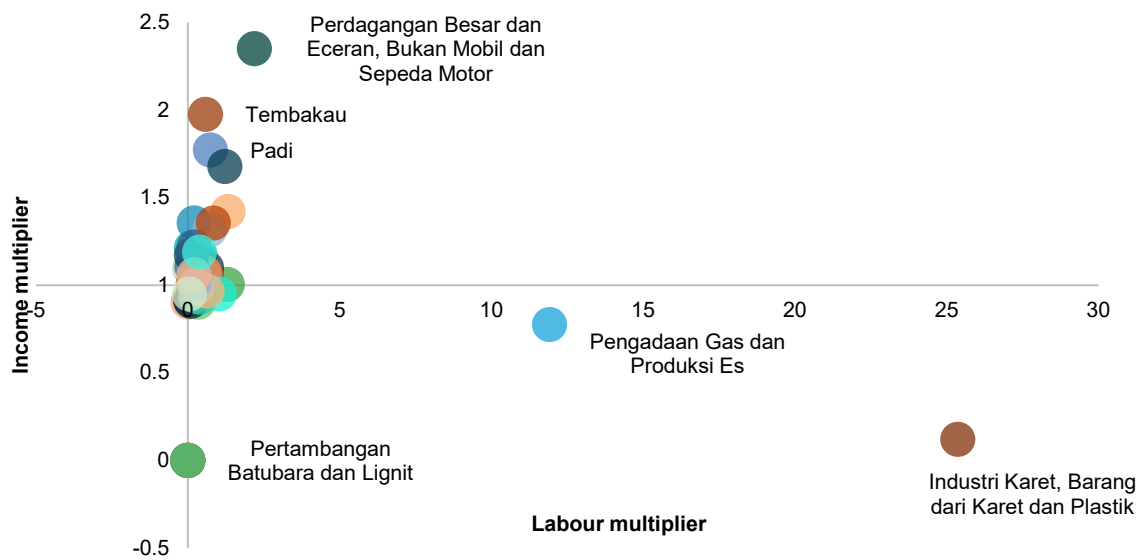
Gambar 2. Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Selatan 2022

Industri pengolahan yang berbasis komoditas sebagian besar menempati urutan tertinggi *backward* dan *forward linkage*. Dalam perspektif keterkaitan sektor, *backward linkage* dan *forward linkage* menunjukkan peran penting sektor pertanian dalam mendukung sektor lainnya di Sumatera Selatan, terutama industri pengolahan (Tabel 1 dan Gambar 2).

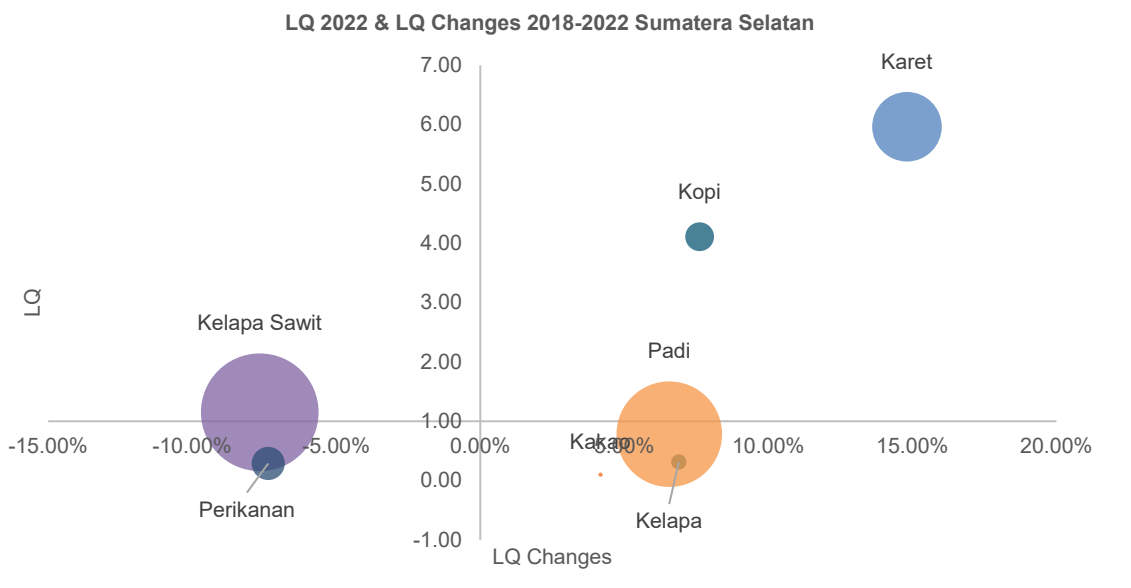
	HIGH GROWTH	LOW GROWTH	
HIGH SHARE	AREA UNGGULAN	AREA MAJU TERTEKAN	KONTRIBUSI DAERAH DIBANDING PROVINSI
	Ogan Komering Ilir; Musi Rawas; Musi Banyuasin; Musi Rawas Utara	Muara Enim; Banyuasin	
LOW SHARE	AREA POTENSIAL	AREA TERTINGGAL	
	OKU Timur	Ogan Komering Ulu; Lahat; OKU Selatan; Ogan Ilir; Empat Lawang; Penukal Abab Lematang Ilir; Palembang; Prabumulih; Pagar Alam; Lubuk Linggau	
LAJU PERTUMBUHAN DAERAH DIBANDING PROVINSI			

Gambar 3. Tipologi Klassen untuk Sektor Pertanian, Kehutanan, dan perikanan (per kapita) Sumatera Selatan 2022

Analisis pengganda pendapatan dan tenaga kerja juga menggambarkan kontribusi sektor-sektor PDRB terhadap penghasilan dan lapangan kerja secara signifikan. Sektor dengan pengganda pendapatan paling tinggi cenderung memiliki angka pengganda tenaga kerja yang rendah, dan sebaliknya. Sektor berbasis lahan seperti Pertanian, Kehutanan dan Hortikultura saat ini cenderung memiliki angka pengganda yang rendah untuk pendapatan dan tenaga kerja (Gambar 4).

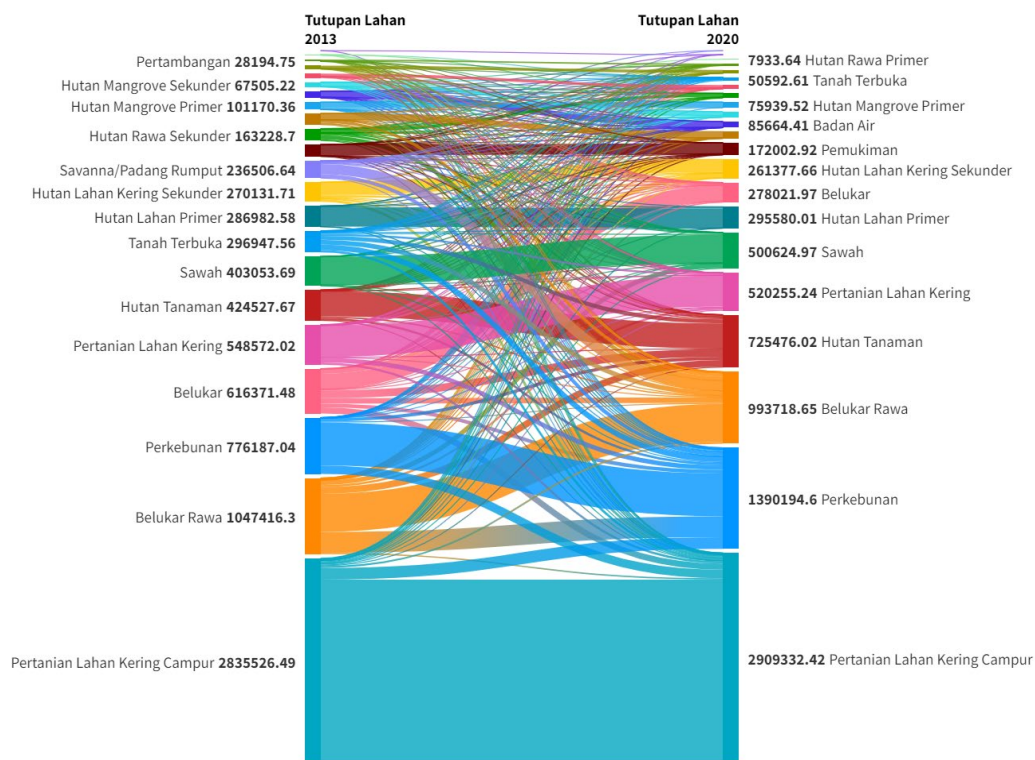


Gambar 4. Analisis penganda pendapatan dan tenaga kerja



Gambar 5. Analisis LQ Komoditas Sumatera Selatan 2018-2022

Selama periode 2013-2020, perubahan tutupan lahan menunjukkan kecenderungan peningkatan lahan perkebunan, sementara pengurangan terbesar terjadi pada lahan belukar. Dalam konteks ini, penyusunan Rancangan Awal RPJPD merupakan momentum krusial untuk menyelaraskan pembangunan berkelanjutan dengan rencana tata ruang yang berbasis pada daya dukung lingkungan hidup. Integrasi ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berlangsung sejalan dengan keberlanjutan lingkungan, menciptakan sinergi positif di Sumatera Selatan (Gambar 6).



Gambar 6. Dinamika Perubahan Tutupan Lahan Sumatera Selatan 2013-2020

Analisis Ketersediaan Lahan dan Tata Ruang



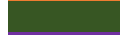




Pemetaan ketersediaan lahan Sumatera Selatan, dengan mempertimbangkan faktor biofisik, sosio-ekonomi, dan kebijakan, merupakan langkah strategis untuk merancang pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Melibatkan aspek kebijakan dalam pemetaan sangat penting untuk memahami regulasi dan batasan-batasan yang diterapkan pada penggunaan lahan. Selain itu, ekosistem gambut yang merupakan ekosistem penting yang terus terdegradasi di Sumatera Selatan juga menjadi faktor pembatas yang penting diikutsertakan dalam analisis.

Tabel 2. Pedoman analisis ketersediaan lahan dan tata ruang Sumatera Selatan

Tutupan lahan	RTRW dan FEG						
	Kawasan Lindung	Kawasan Budidaya Kehutanan-non FEG	Kawasan Budidaya Kehutanan-FEG Budidaya	Kawasan Budidaya Kehutanan-FEG Lindung	Kawasan budidaya non kehutanan-non FEG	Kawasan budidaya non kehutanan-FEG Budidaya	Kawasan budidaya non kehutanan-FEG Lindung
Semua tipe Hutan alam							
Semua Hutan tanaman							
Perkebunan							
Pertanian							
Semak belukar-padang rumput							
Lahan terbuka							

Tutupan lahan	RTRW dan FEG						
	Kawasan Lindung	Kawasan Budidaya Kehutanan-non FEG	Kawasan Budidaya Kehutanan-FEG Budidaya	Kawasan Budidaya Kehutanan-FEG Lindung	Kawasan budidaya non kehutanan-non FEG	Kawasan budidaya non kehutanan-FEG Budidaya	Kawan budidaya non kehutanan-FEG Lindung
Pemukiman dan lahan terbangun							
Badan Air-tambak-rawa							
Pertambangan							

Keterangan:

	Dapat dilakukan ekspansi/pemanfaatan secara langsung
	Ekspansi terbatas, untuk perhutanan sosial dengan mempertimbangkan tinggi muka air
	Ekspansi terbatas, hanya untuk perhutanan sosial atau komoditas kehutanan
	Ekspansi terbatas, dengan mempertimbangkan tinggi muka air
	Ekspansi terbatas, hanya untuk agroforestri
	Tidak dapat ekspansi kecuali untuk restorasi
	Tidak dapat dilakukan ekspansi

Pengembangan lahan budidaya yang sesuai dengan tata ruang, penting untuk mempertimbangkan dengan cermat tutupan lahan eksisting. Hal ini diperlukan agar arah penggunaan lahan dapat diatur dengan jelas, memberikan pedoman yang dapat menjadi landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan. Analisis dilakukan dengan memeriksa alokasi dalam tata ruang, khususnya antara lahan lindung dan lahan budidaya.

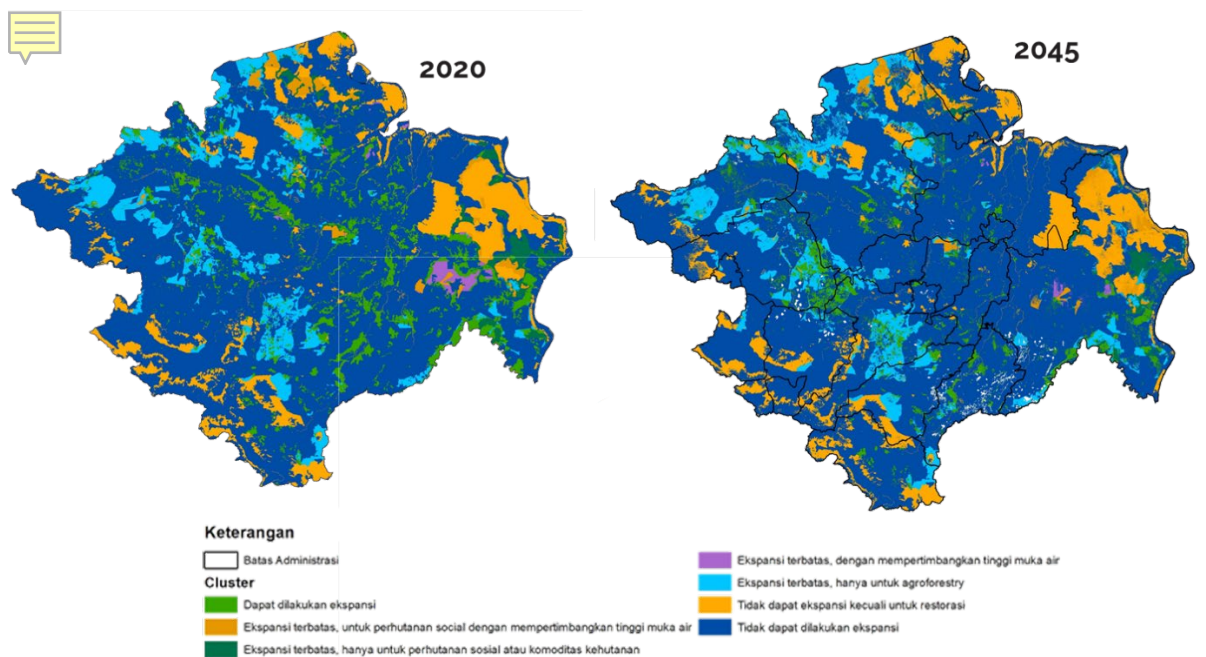
Pendetailan alokasi lahan melibatkan pemahaman yang mendalam terkait pembatasan-pembatasan yang ada, seperti ekosistem gambut dan area yang ditetapkan untuk restorasi. Selain itu, opsi pengelolaan berkelanjutan, seperti perhutanan sosial dan sistem agroforestri, juga menjadi bagian integral dari analisis ini.

Mengacu pada tutupan lahan Sumatera Selatan tahun 2020, luasan lahan yang masih dapat lakukan ekspansi diperkirakan mencapai 702 ribu hektar, sementara luasan lahan yang masih dapat dimanfaatkan dengan berbagai restriksi mencapai 1.1 juta hektar. Angka-angka ini mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa ekspansi lahan tidak hanya menguntungkan sektor budidaya tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan ekosistem dan upaya restorasi. Dengan demikian, pendekatan ini menciptakan kerangka kerja yang holistik, mengarah pada penggunaan lahan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di Sumatera Selatan.

Adapun berdasarkan proyeksi tutupan lahan Sumatera Selatan tahun 2045 (BAU), luasan lahan yang masih mungkin dipergunakan secara langsung (Go) diperkirakan sejumlah 434K ha, sementara luasan lahan yang masih bisa dipergunakan dengan berbagai restriksi adalah 1.08 juta Ha. Baik lahan untuk pemanfaatan langsung dan lahan dengan pemanfaatan terbatas sama-sama mengalami pengurangan yang signifikan dengan skenario BAU. Ada kecenderungan perubahan lahan tidak produktif menjadi lahan produktif semakin meningkat. Kedepannya strategi pemanfaatan lahan perlu mengoptimalkan lahan-lahan terlantar melalui pemulihan dan restorasi.

Tabel 3. Hasil analisis kluster pengembangan lahan tahun 2020 dan 2045 (BAU) berdasarkan tata ruang dan ekologi

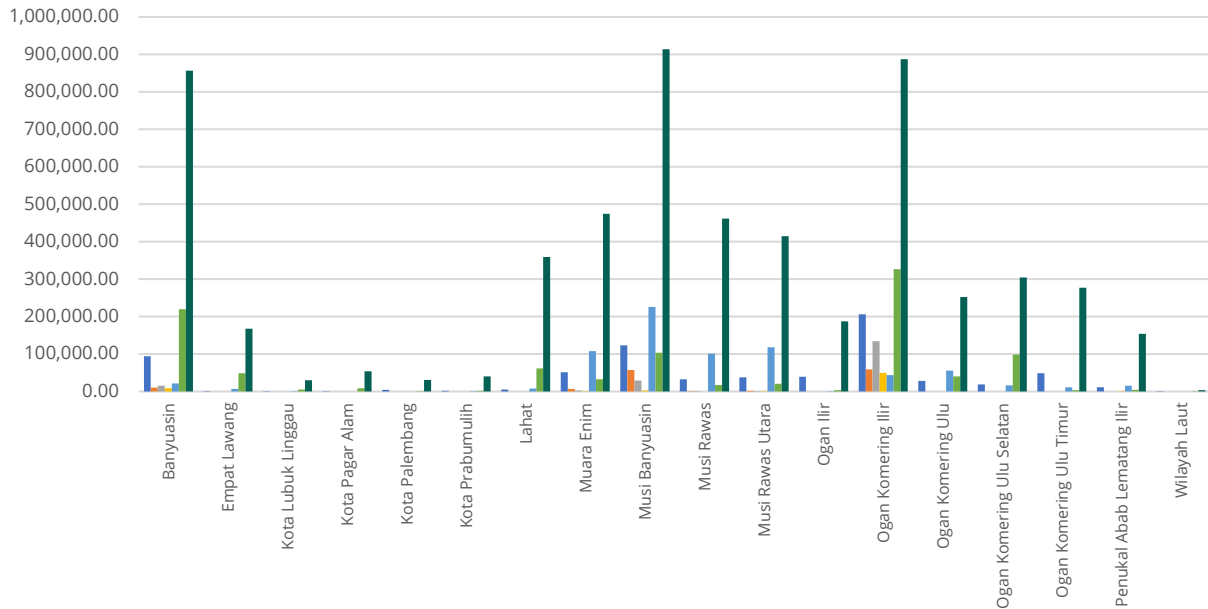
Klaster	Detail	Tutupan Lahan 2020		Tutupan Lahan 2045 (BAU)		Δ2045-2020
		Area (ha)	Persen	Area (ha)	Persen	
Bisa ekspansi (Go)	Bisa ekspansi	702.965,13	8,10%	434.877,79	5,04%	
Ekspansi terbatas (Go-with restriction)	Hanya untuk Perhutanan Sosial dengan memperhatikan tinggi muka air	135.343,44	1,56%	127.938,36	1,48%	-268.087,34
	Hanya untuk komoditas hutan dan Perhutanan Sosial	182.848,01	2,11%	114.577,77	1,33%	-7.405,08
	Ekspansi memperhatikan tinggi muka air	61.077,93	0,70%	18.212,45	0,21%	-68.270,24
	Hanya untuk agroforestri	730.900,84	8,42%	824.225,50	9,55%	-42.865,48
Ekspansi bersyarat (No-Go unless)	Tidak bisa ekspansi kecuali untuk restorasi	995.759,91	11,48%	1.034.621,16	11,99%	93.324,66
Tidak dapat ekspansi (No-Go)	Tidak dapat ekspansi	5.868.276,66	67,63%	6.073.279,17	70,39%	38.861,25
Total		8.677.171,93	100%	8.627.732,20	100%	



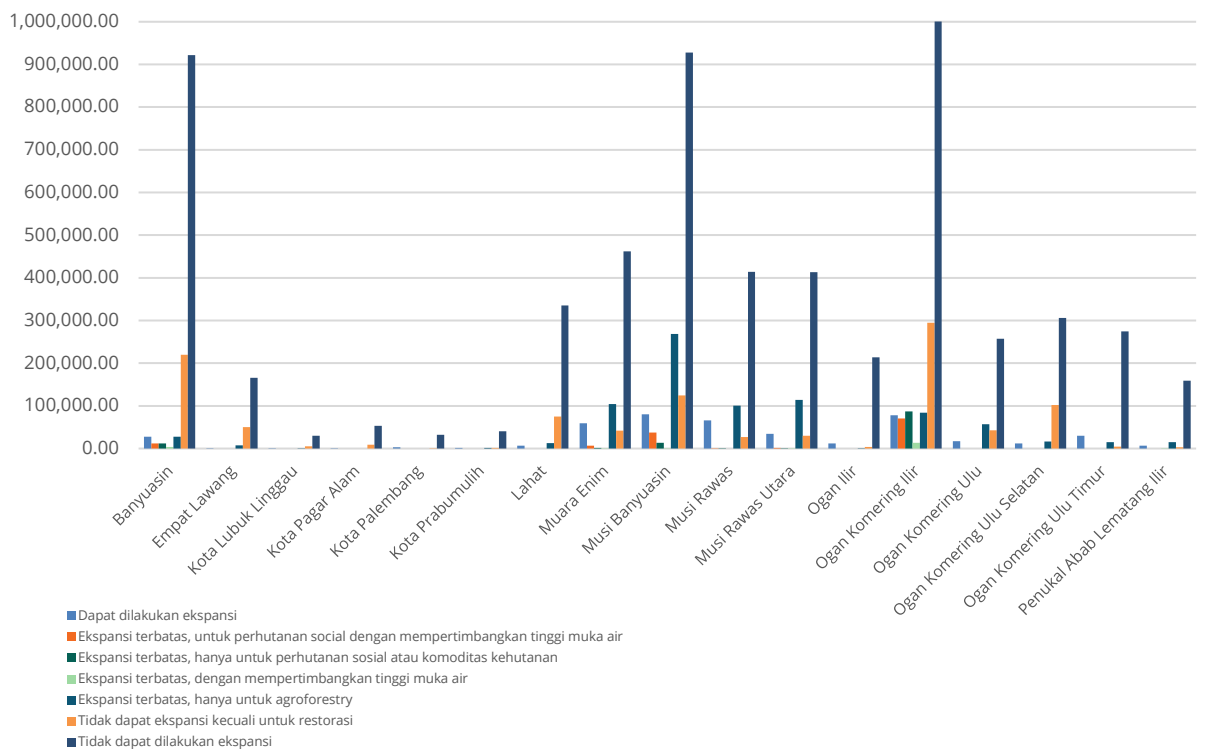
Gambar 7. Hasil analisis kesesuaian lahan tahun 2020 (kiri) dan 2045 BAU (kanan) untuk ekspansi di Sumatera Selatan

Variasi Ketersediaan Lahan Kabupaten/Kota Sumatera Selatan

Arahan pengembangan lahan perlu mempertimbangkan kategori-kategori seperti 'go with restriction' dan 'no-go' di setiap kabupaten/kota. Hal ini menjadi semakin krusial, terutama di kabupaten yang ditandai sebagai 'maju tertekan' dalam analisis Klassen, misalnya Muara Enim dan Banyuasin. Dalam konteks ini, intervensi diperlukan untuk memastikan bahwa perkembangan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dapat terus berkembang tanpa merugikan atau mengorbankan daerah-daerah dengan pembangunan yang terbatas, bersyarat, atau bahkan dinyatakan sebagai 'no-go' untuk pembangunan.



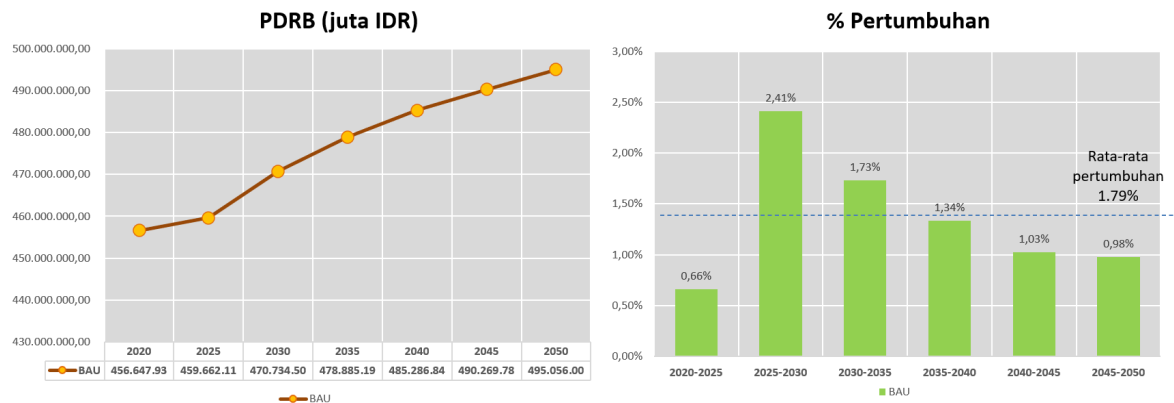
Gambar 8. Kluster pengembangan lahan pada kabupaten/kota Sumatera Selatan tahun 2020



Gambar 9. Kluster pengembangan lahan pada kabupaten/kota Sumatera Selatan tahun 2045

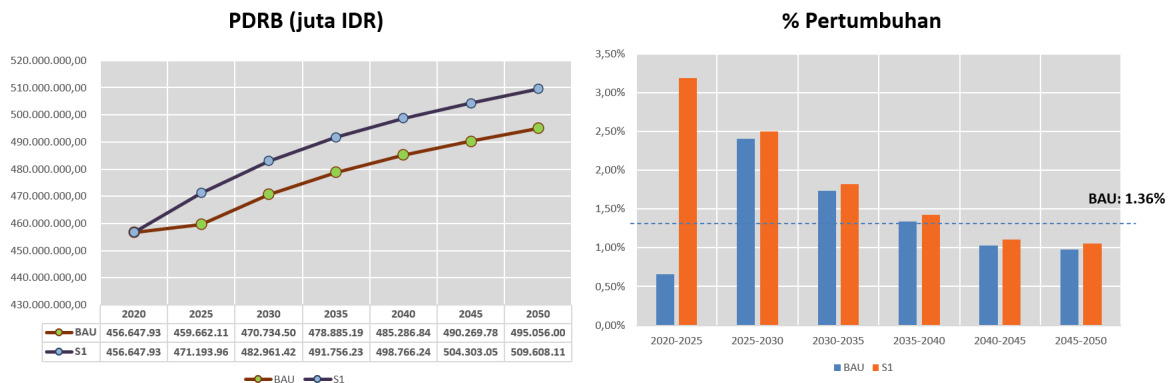
Proyeksi pada Sektor Berbasis Lahan 2020-2050

Proyeksi dilakukan untuk memberikan gambaran jangka panjang ke depan pengaruh dari kebijakan yang diambil dalam pengelolaan lahan di Sumatera Selatan. Dalam kondisi “Bisnis Seperti Biasa/*Business as Usual* (BAU)” pertumbuhan ekonomi dari sektor terbarukan berbasis lahan akan cenderung lebih lambat dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu. Hal ini dikarenakan kemungkinan ekspansi yang terbatas, usia tanaman yang sudah tua, praktik usaha tani yang kurang baik dan rantai nilai yang belum tertata.



Gambar 10. Proyeksi PDRB pada sektor berbasis lahan 2020-2050 dengan skenario BAU

Dengan meningkatkan produktivitas, sektor terbarukan berbasis lahan mampu tumbuh lebih besar dan memberikan sumbangan yang lebih signifikan terhadap perekonomian daerah, walaupun dengan kebutuhan lahan yang sama dengan skenario BAU.



Gambar 11. Proyeksi PDRB pada sektor berbasis lahan 2020-2050 dengan skenario intervensi (S1)

Indikator makro berbasis lahan

Pertumbuhan berbasis ekonomi hijau memerlukan indikator yang mampu menggambarkan pertumbuhan ekonomi dan dampaknya pada lingkungan hidup, khususnya pada lingkungan hidup berbasis lahan. Beberapa indikator yang direkomendasikan dijelaskan pada bagian berikut.

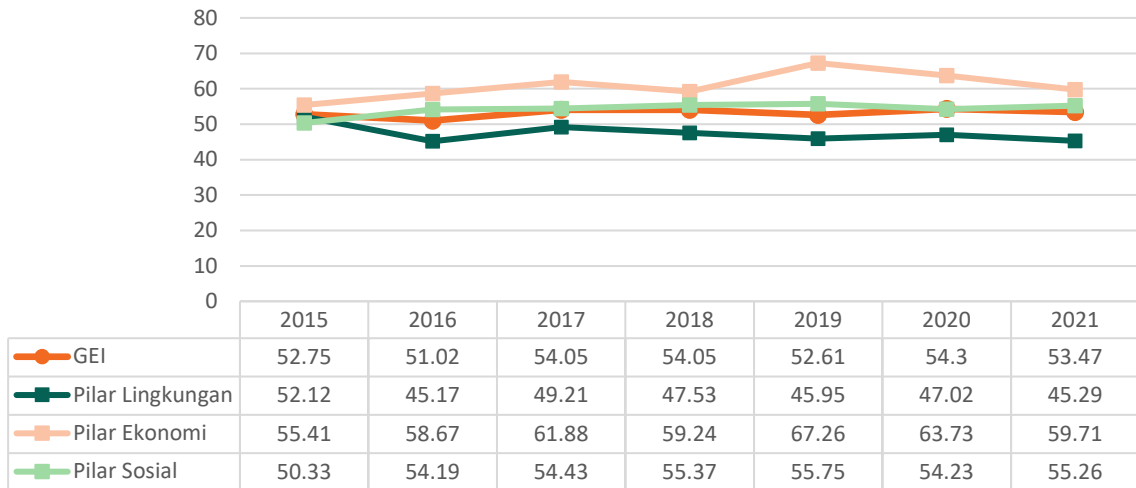
Tabel 4. Metadata indikator pertumbuhan ekonomi hijau berbasis lahan

Indikator	Definisi	Cara Perhitungan	Sumber Data
Pilar Transformasi Ekonomi			
Indeks Ekonomi Hijau	Indeks Ekonomi Hijau merupakan alat ukur kemajuan penerapan ekonomi hijau di suatu daerah yang terdiri dari 3 pilar pembangunan berkelanjutan.	Komposit dari nilai indikator pilar lingkungan, sosial, dan ekonomi	Bappenas (Ringkasan Eksekutif Capaian dan Progres Indeks Ekonomi Hijau Provinsi 2015-2021)
Intensitas emisi (ton CO ₂ -eq/ juta Rupiah PDRB)	Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca adalah besaran Emisi Gas Rumah Kaca yang dilepaskan ke atmosfer per satuan aktivitas tertentu.	Emisi yang dilepaskan pada tahun n dibagi total PDRB pada tahun n	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK); Badan Penetapan Kawasan Hutan (BPKH); Dinas Lingkungan hidup (DLH), Badan Pusat Statistik (BPS)
Pilar Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi			
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan	Berdasarkan tutupan vegetasi hutan, belukar, belukar, belukar rawa, RTH (Ruang Terbuka Hijau), dan hasil RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan): IKTL = 100 ((84,3 – (TLx100))x50/54,3)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) (Peraturan Menteri LHK Nomor 27/2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)
Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	IKEG menggambarkan kualitas Ekosistem Gambut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas Ekosistem Gambut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu	Mengacu pada kriteria baku kerusakan EG: IKEG = (IKEG di FLEG x 0,6) + (IKEG di FBEG x 0,4)	
Kerawanan kebakaran lahan (%)	Risiko kebakaran menunjukkan stabilitas bentang alam terhadap kebakaran yang disebabkan oleh berbagai factor.	Berdasarkan metode pembobotan kerawanan kebakaran lahan: Kerawanan Kebakaran = (30 % x (tutupan lahan)) + ((20 % x elevasi)) + ((20 % x curah hujan)) + ((10 % x jarak dari jalan)) + ((10 % x jarak dari sungai)) + ((10 % x jarak dari permukiman))	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK); Badan Penetapan Kawasan Hutan (BPKH); Dinas Lingkungan hidup (DLH).
Emisi karbon berbasis lahan (Mton CO ₂ -eq)	Emisi yang dilepaskan ke atmosfer yang berasal dari lahan mineral	Emisi karbon = perubahan tutupan lahan x {cadangan karbon tutupan lahan awal – cadangan karbon tutupan lahan saat ini}	
Emisi gambut (Mton CO ₂ -eq)	Emisi yang dilepaskan ke atmosfer yang berasal dari lahan gambut		

Berikut dipaparkan mengenai kondisi-kondisi historis untuk indikator pertumbuhan ekonomi hijau yang di susulkan di atas.

Indeks ekonomi hijau

Meskipun Skor Indeks *Green Economy Index* (GEI) Sumatera Selatan masuk ke dalam kategori baik tier 1, dengan rentang nilai antara 50,01-62,50, perkembangan rata-rata GEI menunjukkan tren negatif sebesar -0,30%. Pilar lingkungan memiliki skor terendah. Indikator seperti 'persentase luas tutupan hutan dari luas daratan' dan 'penurunan tutupan gambut' menjadi tantangan besar yang dihadapi dalam hal keberlanjutan lingkungan.



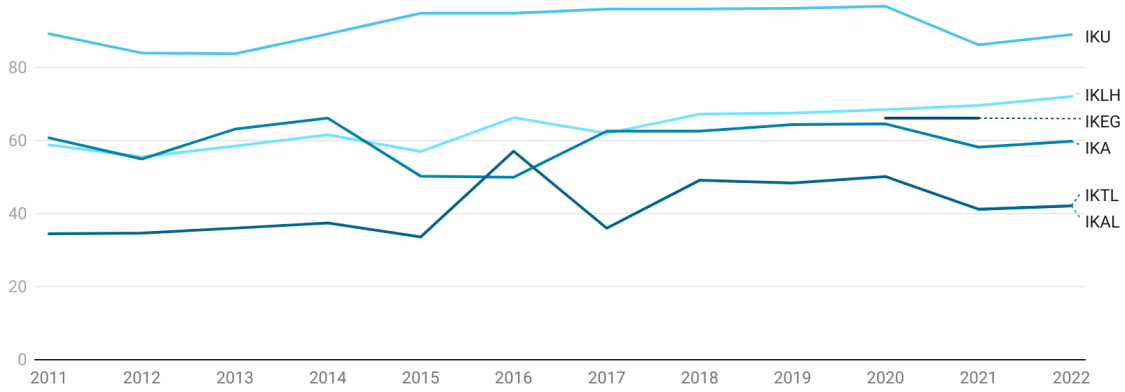
Gambar 12. Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Selatan

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKTL dan IKEG)

Dibandingkan dengan nasional, IKLH Sumsel cenderung di bawah nasional pada tahun 2018-2021. Di konteks ekoregion Sumatera, IKLH Sumatera Selatan termasuk nilai terendah setelah Lampung dan Jambi. Provinsi dengan IKLH tertinggi di ekoregion Sumatera adalah Aceh (Gambar 13). Rincian komponen IKLH Sumsel (2011-2022) menunjukkan adanya fluktuasi untuk masing-masing komponennya, namun ada kecenderungan meningkat. Komponen IKTL cenderung paling rendah di antara komponen IKLH yang lain, yakni berada di rata-rata 40 poin (kategori 'Waspada' dan 'Sangat Kurang Baik'). Nilai capaian IKTL paling tinggi yakni pada tahun 2016 di 57,14 poin. Komponen IKEG baru dihitung pada tahun 2020. Selama tahun 2020-2021, nilai IKEG Sumsel konstan di 66,2 (kategori sedang). Sedangkan IKEG kategori baik meliputi Aceh, Riau, Jambi dan Bangka Belitung (Gambar 14).

Provinsi	IKLH			
	2018	2019	2020	2021
Aceh	56,71	58,07	75,61	75,54
Sumatera Utara	56,49	56,75	69,90	71,15
Sumatera Barat	59,83	58,84	72,79	73,58
Riau	62,92	64,20	69,41	70,72
Jambi	62,76	60,77	70,87	69,04
Sumatera Selatan	61,35	67,22	69,71	69,70
Bengkulu	70,00	67,67	69,92	71,46
Lampung	65,49	67,78	67,66	68,56
Kepulauan Bangka Belitung	73,83	73,78	73,50	72,05
Kepulauan Riau	76,99	78,60	70,51	73,19
Rata-rata	64,64	65,37	70,99	71,50
Nasional	65,14	66,55	70,72	71,45

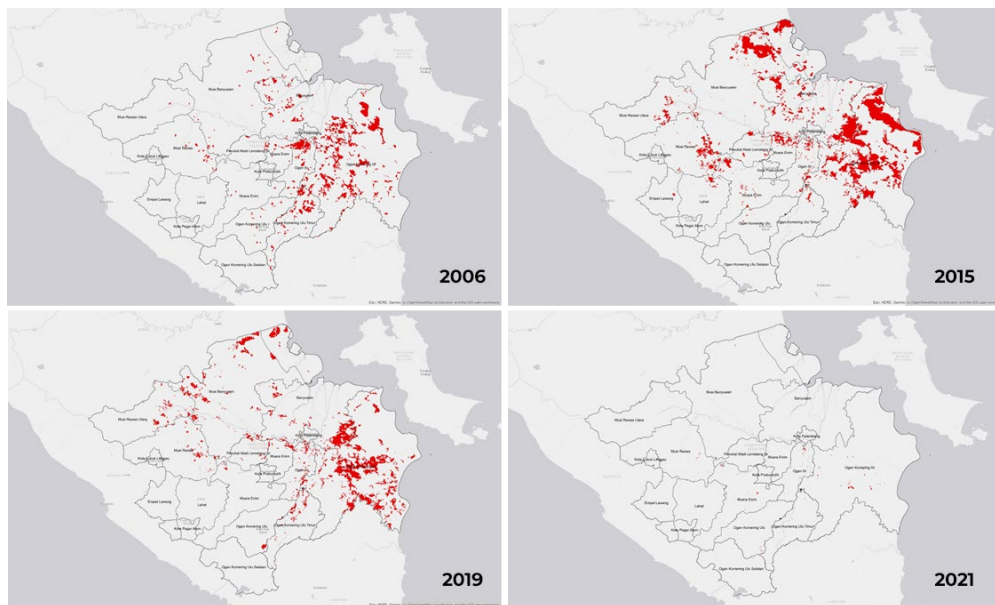
Gambar 10 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Ekoregion Sumatera (2018-2022) (Sumber: Statistik LH KLHK 2022)



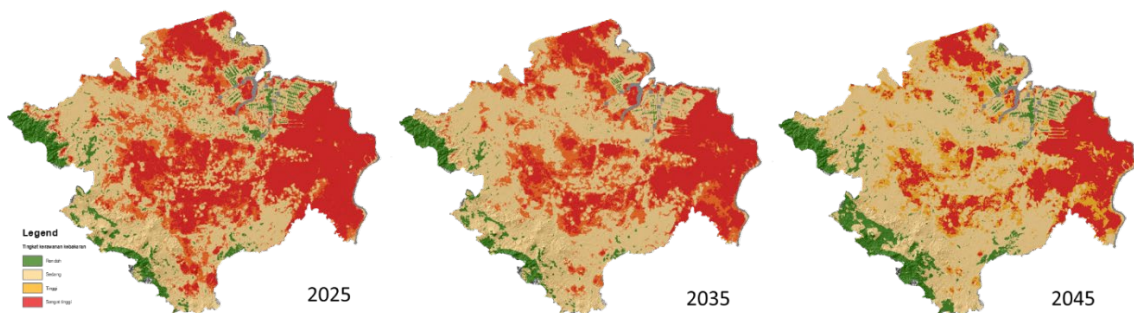
Gambar 11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Sumatera Selatan (2011-2022) (Sumber: PLJiK DLHP Sumsel 2022)

Historis dan proyeksi kerawanan kebakaran lahan

Areal bekas terbakar di Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan pada 3 tahun terakhir. Meski demikian, selama 2006-2021 areal terbakar banyak terjadi secara berulang di lokasi yang sama, yakni daerah timur Sumatera Selatan seperti di Kabupaten OKI, Musi Banyuasin dan Banyuasin (Gambar 15). Apabila dilakukan proyeksi, model skenario BAU memperlihatkan dalam kurun waktu 20 tahun, potensi tingkat kerawanan kebakaran tinggi cenderung menurun. Salah satu variabel penurunan risiko kebakaran hutan dan lahan karena vegetasi yang semakin menurun (Gambar 16).



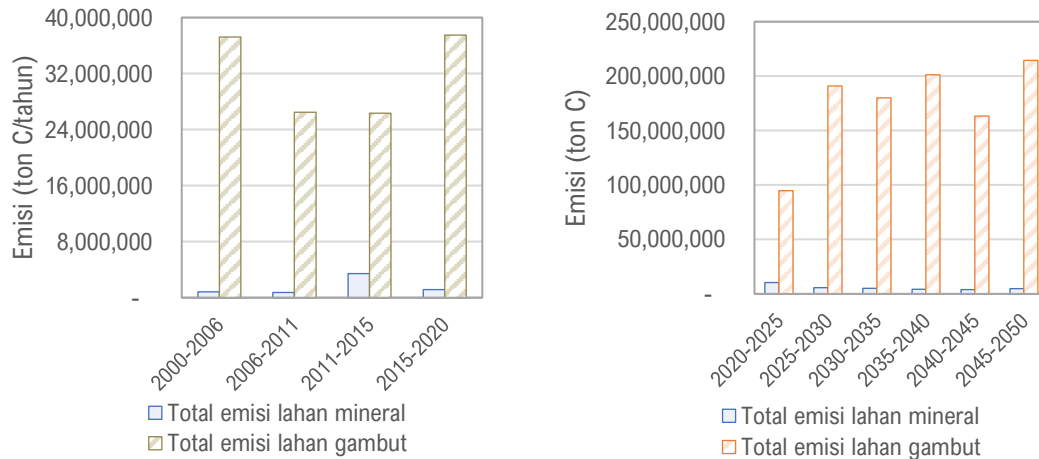
Gambar 12 Historis persebaran kebakaran lahan di Sumsel



Gambar 13. Proyeksi kerawanan kebakaran lahan BAU

Emisi berbasis lahan dan gambut

Emisi berbasis lahan dan gambut merupakan jumlah cadangan karbon yang berkurang akibat perubahan penggunaan lahan dari tipe penggunaan lahan dengan cadangan karbon tinggi menjadi tipe penggunaan lahan dengan cadangan karbon yang lebih rendah. Jenis vegetasi yang membentuk tutupan lahan menentukan besarnya cadangan karbon yang berpotensi untuk teremisi jika terjadi alih fungsi lahan.



Gambar 17.. Historis dan proyeksi emisi lahan mineral dan gambut di Provinsi Sumatera Selatan

Rekomendasi untuk penyusunan rancangan awal RPJPD Sumatera Selatan

1. Pengintegrasian indikator pertumbuhan ekonomi hijau (GGP) yang memperhatikan aspek lahan

Beberapa indikator usulan berikut berupaya memberikan gambaran kinerja pembangunan yang dapat mengukur dampak lingkungan dari pembangunan. Misalnya pada bagian transformasi ekonomi dibutuhkan indikator ekonomi hijau dan intensitas emisi. Sedangkan pada ketahanan sosial, budaya, dan ekologi; indikator kualitas tutupan lahan dan resiliensi terhadap bencana menjadi bagian yang penting untuk diintegrasikan.

2. Penyusunan langkah strategis untuk mengatasi tantangan keterbatasan lahan

Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan sebagai strategi untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dari sektor terbarukan berbasis lahan di Sumatera Selatan dalam 20 tahun yang akan datang, antara lain: perbaikan produktivitas komoditas strategis, diversifikasi produk, peningkatan nilai tambah, perbaikan rantai nilai, serta optimalisasi dan restorasi lahan terlantar.

Perbaikan produktivitas komoditas strategis	Diversifikasi produk	Peningkatan nilai tambah	Perbaikan rantai nilai	Optimalisasi dan restorasi lahan terlantar
<ul style="list-style-type: none"> Peremajaan tanaman-tanaman tua Penyediaan bibit unggul yang terjangkau oleh petani kecil Perbaikan praktik Sistem Usaha Tani (SUTA) 	<ul style="list-style-type: none"> Praktik agroforestri Pengenalan jenis komoditas bernilai ekonomi baru 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan industri hilir yang memanfaatkan bahan baku dari sektor berbasis lahan Pengembangan indikasi geografis Pengemasan dan penguatan identitas produk Pengenalan produk organik 	<ul style="list-style-type: none"> Pengupayaan akses pasar untuk petani kecil Penguatan kelembagaan petani Pengembangan model bisnis berbasis komunitas 	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan, identifikasi, dan evaluasi lahan terlantar untuk pertanian berkelanjutan Penerapan proyek restorasi ekosistem Penerapan praktik konservasi bersama petani dan masyarakat

